
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 11, Nomor 1 (Oktober 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v11i1.2497

Submitted: 17 Agustus 2026	Accepted: 7 Oktober 2026	Published: 22 Oktober 2026
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Dari Trauma Menjadi Pengingat Moral: Etika Mengingat dan Transformasi Sikap Masyarakat Pasca Konflik Poso

Omnesimus Kambodji* ; Henderikus Nayuf; Ni Wayan Elisabet Badilo

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar

*drkambodji@gmail.com**

Abstract

The Malino Declaration (2001–2002) successfully halted large-scale physical violence in the Poso communal conflict; however, it did not automatically eliminate grassroots psychosocial trauma and spatial segregation. This study aims to analyze the post-conflict social recovery process by focusing on the dynamics of trauma, ethics of remembering, and transformation of community attitudes. Employing a descriptive qualitative method, this research integrates Maurice Halbwachs's collective memory theory and Johan Galtung's ABC Theory (Attitude, Behavior, Contradiction). The findings demonstrate that terminating physical conflict must be accompanied by healing inner psychological wounds and addressing latent prejudices. This process occurs when memories of past trauma are no longer harbored as sources of resentment (vindictive memory), but are ethically transformed into a shared moral reminder.

Keywords: *ABC theory; forgiveness; psychosocial trauma; theology of remembrance; violence*

Abstrak

Deklarasi Malino (2001–2002) berhasil menghentikan kekerasan fisik berskala besar dalam konflik komunal di Kabupaten Poso, namun tidak secara otomatis menghapus trauma psikososial dan sekat segregasi di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemulihan sosial pasca-konflik dengan berfokus pada dinamika trauma, etika mengingat, dan transformasi sikap masyarakat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan teori memori kolektif Maurice Halbwachs dan Teori ABC (*Attitude, Behaviour, Contradiction*) Johan Galtung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian konflik fisik perlu diikuti oleh penyembuhan luka batin dan prasangka laten. Proses ini terjadi ketika ingatan atas trauma masa lalu tidak dipelihara sebagai luka yang memicu dendam (*vindictive memory*), melainkan ditransformasikan melalui etika mengingat menjadi pengingat moral (*moral reminder*) bersama.

Kata Kunci: kekerasan; luka batin; pengampunan; teologi ingatan; teori ABC

PENDAHULUAN

Kerusuhan Poso yang meletus dalam rentang tahun 1998 hingga 2001 merupakan salah satu lembaran hitam dalam sejarah Indonesia kontemporer. Konflik komunal berskala besar ini tidak hanya meluluhlantakkan infrastruktur fisik dan melumpuhkan aktivitas perekonomian daerah, tetapi juga menelan korban jiwa yang sangat besar. Dampak yang paling mengkhawatirkan dari tragedi ini adalah terciptanya polarisasi sosial yang tajam, hilangnya rasa saling percaya antarwarga, serta trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Konflik tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya kohesi sosial ketika identitas agama dan etnis dimanipulasi serta dijadikan alat untuk memobilisasi kekerasan massa. Dalam situasi yang penuh ketegangan dan disintegrasi tersebut lahirlah Deklarasi Malino pada tahun 2001–2002 yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Menko-kesra Jusuf Kalla.¹ Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah yang sangat krusial dalam menghentikan benturan fisik dan menjadi ruang rekonsiliasi formal bagi komunitas Kristen dan Muslim untuk menyepakati penghentian perselisihan di Kabupaten Poso.

Meskipun demikian, hasil observasi dan pengalaman empiris penulis menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa berhenti hanya pada penandatanganan kesepakatan politik atau penghentian kekerasan fisik secara formal. Masa transisi sosial pasca Deklarasi Malino justru diwarnai oleh kenyataan trauma psikososial yang mendalam di tingkat akar rumput. Berhentinya letusan senjata di permukaan tidak serta-merta menghapus jejak luka batin, kecemasan laten, dan sekat segregasi wilayah yang memisahkan komunitas Kristen dan Muslim. Warga penyintas hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kerentanan emosional yang sewaktu-waktu dapat dipicu oleh desas-desus atau isu menyesatkan.

Ditinjau dari kerangka Teori ABC (*Attitude, Behaviour, Contradiction*) dari Johan Galtung, kesepakatan damai formal seperti Deklarasi Malino cenderung efektif meredakan dimensi perilaku kekerasan (*Behaviour*), namun dinamika transisi sosial yang dipenuhi trauma psikososial ini mengindikasikan bahwa dimensi sikap batin (*Attitude*) belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, pemulihan hubungan sosial di tingkat basis memerlukan pendekatan terpadu yang mampu

¹ Siti Kholifah, *Resolusi Konflik Poso* (Jakarta: LIPI Press, 2010), 122.

menyembuhkan luka trauma dan membina kembali kepercayaan antarwarga secara berkelanjutan.

Dalam konteks merespons luka batin tersebut secara positif, memori kolektif masyarakat mengenai masa lalu memegang peranan yang sangat menentukan. Sebagaimana ditegaskan Maurice Halbwachs, ingatan kolektif merupakan rekonstruksi sosial atas masa lalu yang terus-menerus disesuaikan berdasarkan situasi dan kebutuhan kelompok pada masa kini. Memori ini memiliki sifat ganda yang saling bertolak belakang: ia dapat dipelihara sebagai memori resensial (*vindictive memory*) yang merawat luka dan dendam terselubung, atau sebaliknya, ditata kembali menjadi pengingat moral (*moral reminder*) yang menyadarkan semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan sejarah yang sama.²

Guna mencegah trauma berubah menjadi siklus dendam baru, proses rekonstruksi memori memerlukan landasan yang dipandu oleh sebuah etika mengingat (*ethics of memory*). Etika mengingat memosisikan

tindakan mengingat bukan untuk menghakimi, melabeli kelompok lain, atau memelihara narasi penderitaan pasif, melainkan sebagai sebuah komitmen moral bersama untuk menghormati martabat kemanusiaan dan merawat keadilan serta keharmonisan di ruang publik.³ Sinergi antara etika mengingat dan pengelolaan memori kolektif menjadi instrumen penting untuk mentransformasi sikap batin masyarakat Poso, mengubah ketakutan dan sekat segregasi menjadi keterbukaan emosional serta pemulihan interaksi sosial di tingkat akar rumput.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai konflik Poso, seperti yang dilakukan oleh Dave McRae,⁴ cenderung berfokus pada analisis taktis keberhasilan Deklarasi Malino dalam meredam konflik fisik serta dinamika keamanan pasca-perjanjian. Penelitian-penelitian yang ada juga sering meromantisasi keberhasilan perdamaian tanpa menggali secara mendalam bagaimana ingatan dan trauma dikelola di tingkat basis.⁵ Masih sangat sedikit kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana etika meng-

² Maurice Halbwachs, *On Collective Memory*, ed. Lewis A. Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 43.

³ Frans Paillin Rumbi, "Etika Mengingat Dan Signifikansinya Di Dalam Membangun Relasi Kristen-Islam Pasca Trauma Peristiwa DI/TII Di Sulawesi Selatan" (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024).

⁴ Dave McRae, *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia* (Laiden: Brill, 2013).

⁵ Pieter G.O. Sunkudon, "Jalur Pembangunan Sosial: Misi Gereja Di Poso Kota Bersaudara Dalam Pemulihan Poso Setelah Seperempat Abad Pascakonflik," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 6, no. 1 (2025): 66–100, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v6i1.310>; Adrian Danang Wardhana et al., "Rekonstruksi Persatuan Pascakonflik Poso Sebagai Implementasi Nilai Ketiga Pancasila Dalam Membangun Harmoni Nasional," *Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2025): 18–23, <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/88>; Michelle

ingat diintegrasikan dengan memori kolektif untuk mentransformasi sikap batin masyarakat pasca-trauma. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan etika mengingat dan rekonstruksi memori kolektif mampu mentransformasi sikap masyarakat dari bayang-bayang trauma menjadi pengingat moral dalam proses perdamaian berkelanjutan di Poso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam integrasi etika sosial dan memori kolektif dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan baik secara langsung maupun jarak jauh dengan para narasumber kunci yang dipilih secara sengaja, meliputi tokoh agama Kristen dan Muslim, perwakilan pemerintah daerah, anggota DPRD Kabupaten Poso, mantan kombatan, serta tokoh perempuan. Guna mendukung data lapangan tersebut, data sekunder juga dihimpun melalui studi pustaka dan observasi partisipatif terbatas atas dinamika sosial ma-

syarakat pasca-konflik. Studi pustaka akan dipakai menelusuri literatur, baik dari buku maupun jurnal mengenai teori memori kolektif Maurice Halbwachs dan Teori ABC (*Attitude, Behaviour, Contradiction*) Johan Galtung.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan berjalan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan dan akurasi temuan penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-narasumber) dan triangulasi metode (memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka). Selain itu, peneliti juga menerapkan prosedur *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada para narasumber sebelum data tersebut disajikan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi Sosial dan Trauma Psikososial Pasca-Deklarasi Malino

Deklarasi Malino (2001–2002) merupakan momentum politik-keamanan yang krusial dalam menghentikan benturan fisik berskala besar dalam konflik komunal di

Alfelnis EB and Tasrifin Tahara, “‘Haunting Memories’: Collective Trauma and Post-Conflict Reconciliation in Poso,” *Journal of Peace, Security and Democracy*

2, no. 1 (2026): 59–78, <https://doi.org/10.63280/jpsd.v2i1.48643>.

Kabupaten Poso. Penandatanganan kesepakatan damai oleh komunitas Kristen dan Muslim yang difasilitasi oleh pemerintah pusat berhasil menyepakati penghentian perselisihan bersenjata, perlucutan senjata, serta penarikan pasukan. Namun, berhentinya kekerasan fisik di permukaan tidak sertamerta mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat ke kondisi semula. Peristiwa kekerasan komunal yang berlangsung sejak tahun 1998 telah meluluhlantakkan infrastruktur fisik, melumpuhkan roda perekonomian daerah, dan menelan korban jiwa yang sangat besar. Tragedi ini menyisakan trauma psikososial yang amat mendalam, duka akibat kehilangan anggota keluarga, serta rasa saling curiga yang tajam di tengah masyarakat penyintas.

Trauma psikososial tersebut bermanifestasi secara nyata dalam ketakutan laten yang melingkupi keseharian warga korban konflik. Bayang-bayang peristiwa kelam seperti pembakaran pemukiman, kehilangan sanak saudara, dan pengalaman mengungsi di bawah ancaman senjata meninggalkan jejak luka batin yang tidak mudah terhapus. Di tingkat akar rumput, ingatan traumatis ini memicu kecemasan yang mendalam setiap kali berhadapan dengan kelompok lain. Ketegangan batin ini membuat masyarakat

berada dalam kondisi bersiaga tinggi secara konstan, di mana setiap desas-desus kecil atau isu menyesatkan yang beredar di tengah publik mampu membangkitkan kembali memori ketakutan dan ancaman benturan masa lalu.

Kondisi psikis yang tertekan ini berimplikasi langsung pada terciptanya segregasi wilayah yang sangat ketat di Kabupaten Poso pasca deklarasi. Pemukiman warga terfragmentasi secara ketat berdasarkan identitas keagamaan, di mana garis batas antarwilayah menjadi pembatas fisik sekaligus emosional yang enggan dilintasi oleh kedua belah pihak. Warga Kristen maupun Muslim merentangkan jarak sosial dan cenderung mengisolasi diri di lingkungan masing-masing demi mencari rasa aman.⁶ Interaksi antarwarga yang dulunya hangat dan terbuka berubah menjadi kekakuan yang diselimuti prasangka. Kenyataan lapangan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik secara formal di tingkat elite belum mampu menyentuh dan memulihkan kerentanan emosional masyarakat di tingkat basis.⁷

Proses pemulihan hubungan sosial pasca-konflik mulai menunjukkan titik terang ketika para tokoh agama dari komunitas Kristen dan Muslim bergerak aktif di

⁶ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

⁷ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

tingkat basis. Institusi keagamaan seperti Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) mengeluarkan berbagai surat penggembalaan dan pesan pastoral yang menekankan pentingnya perdamaian, kasih, dan pemulihan hubungan.⁸ Langkah internal ini disinergikan secara horizontal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso serta lembaga keumatan lainnya. Sinergi antar-pemimpin spiritual ini berhasil meredam kecurigaan teologis dan membuka kembali ruang-ruang dialog interaktif yang sempat tertutup rapat selama masa perang komunal.⁹

Pemulihan hubungan tersebut perlahan bertransformasi ke dalam praktik interaksi harian masyarakat di ruang-ruang publik. Salah satu indikator utama pulihnya kehidupan sosial adalah beroperasinya kembali aktivitas ekonomi bersama di pasar-pasar tradisional. Warga Kristen dan Muslim yang semula saling mengisolasi diri mulai kembali bertransaksi dan berinteraksi secara damai tanpa bayang-bayang ketakutan. Kebiasaan saling menyapa di jalan, perjumpaan dalam hajatan kemasyarakatan, serta kegiatan kerja bakti pembersihan fasilitas umum kembali menjadi pemandangan harian yang meluruhkan sekat-sekat segregasi wilayah. Di samping itu, kelompok perem-

puan muncul sebagai aktor lokal yang sangat progresif dengan membentuk jaringan solidaritas lintas agama di tingkat basis, merawat pemulihan anak-anak penyintas, dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya toleransi.¹⁰

Dinamika transisi sosial di tingkat akar rumput ini didukung oleh langkah-langkah intervensi struktural dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Poso. Pemerintah daerah merumuskan berbagai program rehabilitasi rumah warga yang rusak, legalisasi serta pengembalian hak kepemilikan lahan, penataan jaminan hidup pasca-konflik bagi korban, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi eks-kombatan untuk membantu proses reintegrasi sosial mereka. Secara legislatif, DPRD Kabupaten Poso membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemantau Deklarasi Malino guna mengawasi pelaksanaan butir-butir kesepakatan damai, serta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang inklusif untuk menjamin keadilan sosial di bawah semboyan pemersatu lokal, *Sintuwu Maroso*. Sinergi antara pemulihan psikososial di tingkat masyarakat dan penataan struktural oleh pemerintah inilah yang memungkinkan kehidupan sosial di Poso berangsur pulih dan stabil pasca Deklarasi Malino.¹¹

⁸ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

⁹ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

¹⁰ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

¹¹ Wawancara oleh penulis, Sulawesi Tengah 2025.

Memori Kolektif Maurice Halbwachs

Konsep ingatan kolektif menurut sosiolog dan filsuf Maurice Halbwachs didasarkan pada premis utama bahwa tindakan mengingat bukanlah aktivitas yang murni bersifat personal atau individu. Halbwachs secara tegas menolak pandangan konvensional bahwa memori hanya tersimpan dan terjadi di dalam isi kepala seorang individu secara terisolasi. Sebaliknya, ia berargumen bahwa ingatan selalu memiliki akar yang bersifat kolektif dan senantiasa tertanam di dalam konteks sosial tertentu yang melatarbelakanginya. Proses mengingat pada dasarnya merupakan produk dari sosialitas manusia, yang berarti ingatan tersebut hanya dapat tumbuh, berkembang, dan dirawat melalui interaksi serta hubungan antarmanusia di dalam kelompok masyarakat. Manusia membutuhkan instrumen sosial seperti bahasa, simbol-simbol budaya, serta lingkungan fisik dan kehadiran orang lain sebagai titik acuan eksternal agar tindak mengingat tersebut dapat terwujud.¹²

Dalam merumuskan teori ini, Halbwachs melakukan sintesis kreatif dengan menggabungkan pemikiran filosofis Henri Bergson yang dianggapnya terlalu individualistik dengan sosiologi Emile Durkheim mengenai fakta sosial. Melalui landasan teo-

retis tersebut, Halbwachs mendefinisikan ingatan kolektif sebagai rekonstruksi sosial atas masa lalu yang dilakukan dari sudut pandang masa kini. Hal ini berarti masa lalu tidak pernah diingat secara murni atau objektif apa adanya, melainkan terus-menerus dibentuk ulang dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan, kepentingan, serta situasi kelompok sosial pada masa sekarang. Hubungan timbal balik ini menjadi esensi dari ingatan kolektif, di mana ide-ide personal seseorang tentang dirinya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh persepsi orang lain, dan sebaliknya, ingatan individual turut berkontribusi dalam membentuk serta memperbarui memori kelompoknya.¹³

Lebih lanjut, Halbwachs membagi manifestasi ingatan kolektif ke dalam dua bentuk atau karakter utama di dalam masyarakat. Karakter pertama adalah versi ingatan bersama yang bersifat terbuka, sah, dan diakui secara sadar oleh seluruh anggota kelompok, yang biasanya terejawantahkan melalui monumen fisik atau cerita-cerita sejarah resmi yang tersebar luas. Karakter kedua adalah jenis ingatan yang cenderung tersembunyi atau tidak disadari, yang kerap kali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa negatif atau konflik traumatis masa lalu. Meskipun sengaja ditekan atau disembunyi-

¹² Halbwachs, *On Collective Memory*, 141-42.

¹³ Halbwachs, 1-24.

kan dari wacana publik demi kepentingan tertentu, jejak-jejak memori laten ini tidak pernah sepenuhnya hilang; mereka tetap hidup dan dapat dirasakan melalui arsitektur kota kuno maupun cerita-cerita lisan yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴

Salah satu kontribusi teoretis terpenting Halbwachs adalah pembedaan tegas yang ia lakukan antara konsep ingatan kolektif dan ilmu sejarah. Menurutny, ingatan kolektif adalah suatu proses pikiran yang dinamis, cair, dan terus berlanjut secara alamiah karena ia hanya mengambil dan melestarikan hal-hal dari masa lalu yang masih hidup atau relevan di dalam kesadaran kelompok yang merawatnya. Sementara itu, sejarah dipandang sebagai penulisan data sistematis dan empiris mengenai peristiwa masa lalu yang mengabaikan keterikatan emosional emosi subjeknya demi mencapai objektivitas ilmiah. Ilmu sejarah cenderung memotong-motong waktu ke dalam struktur sebab-akibat yang kaku dan fokus pada periode tertentu, sehingga sering kali mengabaikan kerumitan hubungan antarperistiwa yang terjadi bersamaan. Sebaliknya, ingatan kolektif merangkum emosi, persepsi subyektif, dan ikatan nilai yang justru mem-

berikan makna hidup pada ruang dan waktu yang ditempati oleh masyarakat tersebut.¹⁵

Halbwachs menekankan bahwa keberlangsungan ingatan kolektif sangat bergantung pada dimensi ruang, waktu, serta kehendak politis dari kelompok sosial yang melestarikannya. Kelompok-kelompok sosial, mulai dari unit terkecil seperti keluarga hingga komunitas besar seperti bangsa, membutuhkan ruang fisik atau tempat material tertentu sebagai jangkar bagi identitas bersama mereka. Karena ingatan kolektif ini melekat pada anggota kelompok, terutama generasi tua, maka isinya akan terus berubah, bergeser, dan bertransformasi seiring dengan perubahan komposisi kelompok itu sendiri. Ketika kehendak politis untuk merawat suatu ingatan melemah atau ketika kelompok yang mengingatnya mulai punah, ingatan kolektif tersebut akan mengalami pergeseran tafsir, menunjukkan bahwa memori sosial merupakan sebuah entitas cair yang senantiasa dinegosiasikan ulang demi membangun horison identitas masa depan suatu masyarakat.¹⁶

Teori Konflik dan Perdamaian Johan Galtung

Teori konflik dan perdamaian yang dirumuskan oleh Johan Galtung, seorang pa-

¹⁴ Halbwachs, 142-45.

¹⁵ Halbwachs.

¹⁶ Halbwachs, 144-46.

kar studi perdamaian terkemuka asal Norwegia, berakar pada pemahaman komprehensif mengenai dinamika kekerasan dan metode penyelesaiannya. Galtung memandang konflik dari dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Dari segi positif, konflik dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang membuka peluang untuk memunculkan sesuatu yang baru bagi kemajuan. Sebaliknya, dari segi negatif, konflik dinilai destruktif karena selalu disertai dengan manifestasi kekerasan yang merusak relasi antarmanusia dan mendatangkan kerugian besar dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁷

Di dalam penjelasannya, Galtung menguraikan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam wujud benturan fisik, verbal, maupun tekanan psikis yang melukai kondisi kejiwaan seseorang. Lebih lanjut, ia mengklasifikasikan karakteristik kekerasan ke dalam beberapa kategori, seperti kekerasan yang mengakibatkan ada atau tidaknya pihak yang terluka, ada atau tidaknya pelaku langsung, serta kekerasan yang terjadi secara direncanakan, tidak direncanakan, maupun yang bersifat laten dan tersembunyi.¹⁸

Guna menganalisis anatomi dari fenomena ini, Galtung memperkenalkan mo-

del interpretasi yang sangat fundamental, yaitu Teori ABC (*Attitude, Behaviour, Contradiction*). Teori ini menegaskan bahwa setiap konflik dikonstruksikan oleh tiga aspek yang saling berkelindan secara dinamis, baik secara teoritis maupun praktis. Aspek pertama adalah *Attitude* (sikap), yang berfokus pada cara suatu kelompok atau individu merasakan dan memahami konflik di dalam diri mereka. Aspek kedua adalah *Behaviour* (perilaku), yang berkenaan dengan respons tindakan konkret atau ekspresi seseorang saat berhadapan langsung dengan situasi konflik. Sementara aspek ketiga adalah *Contradiction* (kontradiksi), yang merujuk pada akar permasalahan struktural atau ketidakselarasan mendasar yang memicu lahirnya konflik tersebut. Di dalam pola interpretasi ini, Galtung menegaskan bahwa kontradiksi (C) bertindak sebagai akar dari konflik, sedangkan sikap (A) dan perilaku (B) dikategorikan sebagai metakonflik yang muncul ke permukaan akibat adanya akar kontradiksi tersebut.¹⁹

Ditinjau dari periodisasinya, pola teori ABC ini dikembangkan untuk mengklasifikasikan tahapan konflik ke dalam tiga fase kronologis, yaitu situasi sebelum konflik

¹⁷ Johan Galtung and Dietrich Fischer, *Johan Galtung Pioneer of Peace* (New York: Springer, 2013), 60.

¹⁸ John Galtung, *Studi Perdamaian* (Surabaya: Pustaka Uereke, 2003), 168-72.

¹⁹ Galtung and Fischer, *Johan Galtung Pioneer of Peace*, 62.

(kekerasan), selama konflik berlangsung, dan masa setelah konflik terjadi. Tahap sebelum konflik dicirikan sebagai situasi perdamaian awal, di mana kehidupan sosial tampak saling menopang dan penuh inisiatif. Namun, ketika kontradiksi yang tersimpan di bawah permukaan pecah menjadi kekerasan, baik berupa kekerasan langsung oleh pelaku, kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural, hal tersebut serta-merta merusak tatanan sosial dan memicu kekacauan. Oleh sebab itu, Galtung menekankan perlunya sebuah proses intervensi komprehensif melalui mediasi untuk mengupayakan rekonstruksi sosial sekaligus mewujudkan rekonsiliasi politik yang sejati di antara pihak-pihak yang bertikai.²⁰

Galtung juga menawarkan kategorisasi konflik yang sangat sistematis berdasarkan lokus atau tingkat kasus yang terjadi, mulai dari level mikro, meso, hingga makro. Konflik pada level mikro merupakan konflik skala kecil yang dialami oleh individu secara personal dalam ruang lingkup keluarga, asosiasi, ataupun organisasi terdekat. Sementara itu, level meso mencakup wilayah konflik yang lebih luas, seperti ketegangan antar-gender, perselisihan antargenerasi, antarbangsa, serta konflik horizontal

yang terjadi di dalam komunitas internal penduduk sebuah negara. Pada tingkat tertinggi, yaitu level makro, konflik melibatkan dinamika global yang jauh lebih kompleks karena sudah melibatkan benturan kepentingan antar-negara, wilayah regional, perbedaan agama, hingga pertentangan antar-peradaban di dunia.²¹

Dalam aplikasinya secara klinis untuk studi perdamaian, kerangka ABC ini diterapkan melalui metode berkesinambungan yang bergerak dari tahap diagnosis, prognosis, hingga terapi. Berdasarkan matriks model perdamaian Galtung, proses penyelidikan dimulai dari tahap *Diagnosis* untuk memetakan kondisi kultural (*culture*), alamiah (*nature*), dan struktural (*structure*) dari konflik, termasuk menganalisis segitiga ABC pada tingkat laten (*Deep ABC triangle*) maupun manifestasi di permukaan (*Conflict Surface ABC triangle*). Setelah diagnosis tegak, analisis berlanjut ke tahap *Prognosis* untuk memprediksi konsekuensi logis dari konflik tanpa intervensi, yang mendata dampak tingkat pertama berupa frustrasi, dampak tingkat kedua berupa polarisasi dan dehumanisasi, hingga terbentuknya lingkaran setan budaya perang (*vicious cycles of war*). Alur analisis ini pada akhirnya bermuara

²⁰ Frans Paillin Rumbi, "Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara Dengan Menggunakan Teori ABC Dari Johan Galtung," in *Teologi Kontekstual & Kearifan*

Lokal Toraja, ed. Binsar Jonathan Pakpahan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 66.

²¹ Rumbi.

pada tahap *Therapy*, di mana serangkaian tindakan intervensi damai seperti transformasi kemarahan, pembangunan perdamaian (*peacebuilding*), resolusi konflik melalui dialog, serta konsiliasi masa lalu diterapkan secara terukur untuk memutus siklus kekerasan dan membangun struktur serta budaya damai yang berkelanjutan.²²

Menganyam Ingatan Membumikan Kasih: Etika Mengingat sebagai Fondasi Pemulihan Trauma Pasca Deklarasi Malino

Tragedi kemanusiaan yang melanda Kabupaten Poso dalam rentang tahun 1998 hingga 2001 telah meninggalkan luka yang teramat mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat. Polarisasi sosial yang tajam, hilangnya rasa saling percaya, serta trauma psikososial berkelanjutan sempat mengancam keberlangsungan tatanan hidup bersama di daerah tersebut. Kehadiran Deklarasi Malino (2001–2002) memang berhasil bertindak sebagai intervensi politik-keamanan yang efektif guna menarik batas tegas dari permusuhan bersenjata di tingkat formal. Penandatanganan pakta damai oleh pihak-pihak yang bertikai di bawah fasilitas pemerintah berhasil menghentikan pertumpahan darah, melakukan perlucutan senjata, serta memulihkan stabilitas keamanan kawasan secara gradual.

Namun, pengalaman empiris di Poso memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh dan tidak bisa berhenti hanya pada penandatanganan kesepakatan politik di tingkat elite. Berhentinya pertempuran fisik di permukaan tidak secara otomatis menghapus bayang-bayang ketakutan dan luka batin yang dirasakan oleh para penyintas di tingkat akar rumput. Perdamaian yang berkelanjutan pasca-konflik menuntut fondasi yang jauh lebih kokoh dan menyentuh aspek emosional, yakni melalui pemulihan dimensi batiniah dan penyembuhan luka trauma masyarakat. Apabila proses rekonsiliasi mengabaikan dimensi penyembuhan ingatan ini, maka tatanan damai yang dibangun di atas kertas akan tetap rapuh dan rentan runtuh oleh letupan prasangka masa lalu.

Dalam konteks inilah, pengelolaan ingatan atas trauma masa lalu menjadi variabel paling krusial yang menentukan arah masa depan masyarakat pasca-konflik. Tindakan mengingat (*remembering*) diposisikan bukan lagi untuk merawat luka lama yang memicu prasangka atau dendam kesumat (*vindictive memory*), melainkan ditransformasikan melalui 'etika mengingat' (*ethics of memory*). Mengingat peristiwa konflik secara etis berarti menjadikannya sebagai penguat moral (*moral reminder*) bersama

²² Rumbi, 67.

agar kepedihan dan tragedi kemanusiaan yang sama tidak pernah terulang kembali di masa depan. Etika mengingat mengarahkan energi kolektif masyarakat dari keputusasaan trauma menuju kesadaran etis untuk saling merangkul dan menghargai martabat sesama.

Perspektif Maurice Halbwachs mengenai memori kolektif memberikan pijakan teoretis yang kuat dalam memahami proses transformasi ingatan sosial tersebut. Memori bukanlah rekaman statis masa lalu, melainkan konstruk sosial yang terus-menerus direkonstruksi dan diinterpretasikan ulang berdasarkan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Melalui proses interaksi yang dinamis, masyarakat Poso diajak untuk mere-definisikan kembali narasi kolektif mereka tentang konflik. Penderitaan masa lalu diolah sedemikian rupa menjadi memori kolektif yang mendidik, di mana nilai-nilai kebersamaan dan empati diproduksi ulang demi menjaga dan merawat kedamaian hidup bertetangga.

Proses penataan ingatan kolektif ini beroperasi secara beriringan dengan kerangka transformasi konflik dari Johan Galtung melalui Teori ABC (*Attitude, Behaviour, Contradiction*). Deklarasi Malino pada dasarnya baru menyelesaikan dimensi perilaku kekerasan (*Behaviour*), sementara trauma psikososial dan prasangka laten masih

mengendap pada dimensi sikap batin (*Attitude*). Penerapan etika mengingat bertindak sebagai media terapi psikososial yang memulihkan kerentanan sikap batin tersebut. Ketika trauma batin berhasil disembuhkan dan prasangka teologis diredam melalui komitmen moral bersama, maka respons perilaku yang muncul di ruang publik bergeser secara konsisten dari sikap defensif-penuh curiga menjadi interaksi sosial yang kooperatif dan saling menopang.

Dinamika pemulihan sosial di Kabupaten Poso menegaskan bahwa rekonsiliasi yang abadi tumbuh secara organik melalui sinergi antara kesadaran etis masyarakat di tingkat basis dan intervensi struktural pemerintah. Penyembuhan luka batin (*Attitude*) melalui pengolahan trauma secara etis dan pembentukan memori kolektif sebagai *moral reminder* merupakan prasyarat mutlak untuk memutus mata rantai konflik komunal. Dengan merawat ingatan bersama secara bijak dan mengintegrasikannya dengan kearifan lokal *Sintuwu Maroso*, masyarakat Poso tidak hanya berhasil menyembuhkan diri dari trauma masa lalu, tetapi juga membangun benteng ketahanan sosial yang kokoh demi menjamin keberlanjutan perdamaian di masa depan.

Analisis atas dinamika sosial dan ingatan trauma pasca Deklarasi Malino tidak boleh berhenti sekadar sebagai perata-

pan atas penderitaan masa lalu atau narasi luka yang statis. Melalui kacamata Teologi Ingatan, ingatan kolektif masyarakat dipanggil untuk diolah secara benar (*remembering rightly*). Sebagaimana ditegaskan oleh Miroslav Volf dan Binsar Pakpahan seperti yang dikutip Frans Rumbi, etika mengingat yang benar didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana Allah mengingat manusia. Ingatan Allah bukanlah memori pasif untuk memelihara dendam (*ressentiment*), melainkan tindakan aktif penyelamatan, penegakan keadilan, dan pemulihan relasi yang memutuskan mata rantai kekerasan dalam sejarah.²³

Dalam tradisi Protestan, cara Allah mengingat menemukan puncaknya pada karya pemulihan Kristus di kayu salib serta perayaan sakramen Perjamuan Kudus. Salib memperlihatkan bagaimana Allah mengingat manusia bukan dengan memperhitungkan pelanggaran masa lalu, melainkan dengan menawarkan pengampunan yang memulihkan melalui pengorbanan Kristus (Yes. 43: 25). Melalui perintah Kristus untuk “mengingat” (*anamnesis*) dalam Perjamuan Kudus, ingatan akan penderitaan masa lalu dihu-

bungkan dengan teologi pengharapan. Ingatan ini tidak mengunci korban pada trauma, melainkan mengorientasikan mereka pada solidaritas Allah dan pembebasan masa depan yang merangkul baik korban maupun pelaku dalam ruang pendamaian.

Dengan demikian, refleksi ini bergerak melampaui sekadar teologi luka menuju apa yang disebut Septemmy Lakawa sebagai teologi imajinatif dan konstruktif.²⁴ Teologi imajinatif merefleksikan cara Allah mengingat yang penuh rahmat, sehingga membuka ruang bagi penyintas dan pelaku untuk merekonstruksi masa depan bersama. Dalam praksis hidup masyarakat pasca-konflik, teologi ingatan ini menjelma dalam bentuk *lived theology* atau “mengampuni tanpa mengatakan”—di mana pengampunan dan penerimaan sosial diwujudkan secara konkrit sebagai wujud nyata dari kasih Allah yang merangkul dan memulihkan.

KESIMPULAN

Ingatan atas kekerasan tidak boleh dipelihara sebagai luka yang memicu dendam (*vindictive memory*), melainkan diolah

²³ Rumbi, “Etika Mengingat Dan Signifikansinya Di Dalam Membangun Relasi Kristen-Islam Pasca Trauma Peristiwa DI/TII Di Sulawesi Selatan.”; Frans Paillin Rumbi and Yosef Sulle, “Rekonsiliasi Dan Pengampunan: Memori Kolektif Umat Kristen Terhadap Peristiwa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Di Seko Lemo Tahun 1951-1965,” *Indonesian Journal of Theology* 12, no. 2 (2024): 225–48, <https://doi.org/10.46567/ijt.v12i2.467>; Handry Handry, “Transformasi Memori

‘Air Raja’ Di Negeri Porto-Haria Dari Simbol Konflik Menjadi Simbol Perdamaian,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (January 9, 2026): 678–94, <https://doi.org/10.30648/DUN.V10I2.1788>.

²⁴ Septemi Lakawa, *Kemurahhatian & Trauma: Imajinasi Baru Misi Kristiani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Mission 21, 2023).

secara etis menjadi pengingat moral (*moral reminder*) bersama untuk mencegah berulangnya tragedi serupa. Sinergi antara pemulihan sikap batin melalui penataan ingatan kolektif di tingkat basis ini mewujudkan secara riil dalam pemulihan interaksi harian di pasar tradisional, runtuhnya sekat segregasi wilayah, serta kepemimpinan proaktif tokoh agama dan jaringan perempuan. Pengolahan trauma secara etis menjadi fondasi paling krusial dalam merawat kohesi sosial dan menjamin kedamaian yang abadi.

PERNYATAAN PENULIS

Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tiga orang penulis yang namanya tercantum dalam identitas artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- EB, Michelle Alfelnis, and Tasrifin Tahara. “‘Haunting Memories’: Collective Trauma and Post-Conflict Reconciliation in Poso.” *Journal of Peace, Security and Democracy* 2, no. 1 (2026): 59–78. <https://doi.org/10.63280/jpsd.v2i1.48643>.
- Galtung, Johan, and Dietrich Fischer. *Johan Galtung Pioneer of Peace*. New York: Springer, 2013.
- Galtung, John. *Studi Perdamaian*. Surabaya: Pustaka Uereke, 2003.
- Halbwachs, Maurice. *On Collective Memory*. Edited by Lewis A. Coser. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Handry, Handry. “Transformasi Memori ‘Air Raja’ Di Negeri Porto-Haria Dari Simbol Konflik Menjadi Simbol Perdamaian.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (January 9, 2026): 678–94. <https://doi.org/10.30648/DUN.V10I2.1788>.
- Kholifah, Siti. *Resolusi Konflik Poso*. Jakarta: LIPI Press, 2010.
- Lakawa, Septemi. *Kemurahhatian & Trauma: Imajinasi Baru Misi Kristiani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Mission 21, 2023.
- McRae, Dave. *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*. Laiden: Brill, 2013.
- Rumbi, Frans Paillin. “Analisis Perdamaian Dalam Ma’bisara Dengan Menggunakan Teori ABC Dari Johan Galtung.” In *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokal Toraja*, edited by Binsar Jonathan Pakpahan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- . “Etika Mengingat Dan Signifikansinya Di Dalam Membangun Relasi Kristen-Islam Pasca Trauma Peristiwa DI/TII Di Sulawesi Selatan.” Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024.
- Rumbi, Frans Paillin, and Yosef Sulle. “Rekonsiliasi Dan Pengampunan: Memori Kolektif Umat Kristen Terhadap Peristiwa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Di Seko Lemo Tahun 1951-1965.” *Indonesian Journal of Theology* 12, no. 2 (2024): 225–48. <https://doi.org/10.46567/ijt.v12i2.467>.
- Sunkudon, Pieter G.O. “Jalur Pembangunan Sosial: Misi Gereja Di Poso Kota Bersaudara Dalam Pemulihan Poso Setelah Seperempat Abad Pascakonflik.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 6, no. 1 (2025): 66–100. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v6i1.310>.

Wardhana, Adrian Danang, Diftha Nadilla Anur, Jimmy Amirul Aziz, Nadya Adha Rizky, and Raisha Kamilia Sudrajat. "Rekonstruksi Persatuan Pascakonflik Poso Sebagai Implementasi Nilai Ketiga Pancasila Dalam Membangun Harmoni Nasional." *Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2025): 18–23. <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/88>.